

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Adanya penyelenggaraan desentralisasi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat. Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Salah satu aspek pemerintahan daerah yang perlu diatur dengan seksama adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan penganggaran daerah. Pemerintah daerah dapat menerapkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja, yang menekankan pada efisien, penggunaan yang tepat, pelaksanaan tepat waktu, dan akuntabilitas dalam penggunaannya. Untuk memenuhi pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks seiring dengan diterbitkannya regulasi baru oleh pemerintah, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun APBD berbasis kinerja.

APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk uang untuk jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. Menurut aturan pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah mencakup semua

hak dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah terkait rangka menjalankan tugas pemerintahan daerah yang bisa dinilai dengan nilai uang, serta semua jenis kekayaan yang bisa dimiliki oleh daerah dalam kaitannya tentang hak dan kewajiban daerah tersebut. Ini berkaitan dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, terutama dalam konteks fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. APBD berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, karena menyajikan informasi mengenai rencana kegiatan dan pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dapat merencanakan kebutuhan keuangan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya, hal tersebut dikarenakan adanya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan operasional pemerintah agar rencana kegiatan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu APBD menjadi tolak ukur penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran tersebut akan berguna untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja yang telah dicapai dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. Karena masyarakat yang menjadi pendana melalui pembayaran pajak daerah ingin memastikan apakah dana tersebut telah dikelola dan digunakan dengan tepat, efisien, efektif, ekonomis, transparan, berorientasi dalam kepentingan publik.

Menurut Amelia (2022) kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli

daerah untuk memenuhi kebutuhannya dan mendukung berjalannya roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta pembangunan daerahnya. Hal ini dilakukan tanpa sepenuhnya bergantung kepada pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan, dan memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan pengukuran kinerja keuangan merupakan untuk menilai kinerja keuangan dengan melihat potensi dan efektivitasnya dengan mempertimbangkan biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan berupa laporan operasi pemerintah. Manfaat pengukuran kinerja keuangan adalah untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja pemerintah dengan membandingkan skema tenaga kerja (Atmoko & Khairudin, 2022).

Pemendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur penggunaan anggaran berbasis kinerja. Untuk menentukan akuntabilitas organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang unggul dan efektif, evaluasi kinerja diperlukan. Penganggaran berbasis kinerja, menurut Pemendagri No. 77 tahun 2020, mengacu pada dua faktor yaitu hubungan antara anggaran dan realisasi yang diharapkan, dan efisiensi dalam pencapaian realisasi tersebut. Oleh karena itu, anggaran yang didasarkan pada kinerja harus terfokus pada tujuan. Akibatnya, keberhasilan system anggaran diukur dengan kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil anggaran dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif. Laporan pertanggungjawaban kinerja harus dibuat tentang hasil pengukuran kinerja di

sektor publik. Akuntabilitas publik ditunjukkan oleh pelaporan publik (Dalam & Republik, 2020).

Pengelolaan anggaran daerah telah menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan dalam suatu pemerintahan, baik itu ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah membuat atau menciptakan dan memberlakukan Undang–Undang yang bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan Anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah. Anggaran merupakan suatu rencana kuantitatif periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi juga dapat dalam bentuk barang atau jasa.

Pada penyusunan anggaran hasil yang diperoleh berupa laporan keuangan. Salah satu komponen yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan adalah laporan realisasi anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjelaskan tentang kegiatan keuangan pemerintah yang menunjukkan kepatuhan terhadap APBN/APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah dalam satu periode pelaporan. Oleh karena itu, laporan realisasi anggaran (LRA) menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dianggap penting. Berdasarkan laporan realisasi anggaran (LRA) tersebut,

pembaca laporan dapat melakukan analisis kinerja keuangan dengan menganalisis belanja dan analisis pembiayaan.

Laporan realisasi anggaran dianggap sangat krusial karena memberikan informasi komprehensif mengenai pelaksanaan anggaran, yang sangat berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terutama dalam aspek efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Laporan realisasi anggaran juga merupakan jenis laporan keuangan daerah yang pertama kali dihasilkan sebelum laporan lainnya seperti neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas. Oleh karena itu, evaluasi terhadap laporan realisasi anggaran dianggap sangat penting, karena laporan ini dapat memberikan informasi krusial bagi pengguna anggaran untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Dengan menerapkan pernyataan standar akuntansi pemerintahan, diharapkan dapat mengungkapkan tingkat kesesuaian dalam proses penyajian laporan realisasi anggaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintah dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja dapat dilakukan dengan baik dan benar, sehingga dapat mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang optimal.

Alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dengan menerapkan rasio keuangan terhadap APBD. Rasio-rasio tersebut diantaranya adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan analisis rasio keuangan belanja daerah digunakan untuk mengetahui seberapa efektif pemerintah

daerah mengelola anggarannya dengan menghindari belanja yang boros dan tidak terarah. Setelah pengeluaran terjadi dan tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis pengeluaran daerah ini harus menjadi dasar untuk penilaian, revisi, dan perbaikan di masa mendatang (Putu et al., 2023).

Menurut Mahmudi (2015), menyatakan bahwa kinerja anggaran suatu lembaga dapat dinilai dengan menggunakan beberapa pengukuran. Analisis varians belanja, apakah pengeluaran actual sesuai dengan jumlah yang dianggarkan. Analisis pertumbuhan belanja, yang mengindikasikan pertumbuhan positif dan negatif. Analisis keserasian belanja, yang mencakup proporsi belanja operasi pada umumnya 60-90% sedangkan proporsi belanja modal 5-20%. Rasio efisiensi belanja, yang mengukur sejauh mana anggaran digunakan yang baik apabila rasio efisiensinya kurang dari 100%. Selain itu, perhitungan rasio analisis belanja anggaran juga dapat mencakup rasio efektivitas belanja, untuk mengetahui pencapaian realisasi anggaran dan target belanja jika rasio efektivitas belanja lebih dari 100% (dalam Baidhowi, 2021).

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemali Comal merupakan salah satu dinas di bidang pengelolaan sumber daya air yang termasuk dalam satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (PUSDATARU) Provinsi Jawa Tengah dibawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia. Balai PSDA Pemali Comal dibentuk sebagai keberlanjutan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan sumber daya air. Dalam melakukan segala operasionalnya, Balai

PSDA Pemali Comal mendapatkan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemali Comal bukanlah dinas penghasil sehingga tidak menghasilkan hasil pendapatan. Balai PSDA Pemali Comal tidak memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah, Hal ini disebabkan karena tujuan utama dan fokusnya adalah pada pengelolaan aset bukan pada menghasilkan pendapatan atau keuntungan.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi APBD Balai PSDA Pemali Comal

Tahun	Target/Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
2021	Rp 12.508.224.000	Rp 12.350.968.931
2022	Rp 16.817.775.000	Rp 16.442.692.285
2023	Rp 17.498.204.000	Rp 16.894.818.821

Sumber: Data Diolah 2024

Berdasarkan tabel diatas yang terjadi pada perencanaan anggaran dan laporan keuangan realisasi anggaran pada Balai PSDA Pemali Comal peningkatan pada tahun 2021-2023. Biaya yang meningkat dan anggaran yang dikeluarkan seringkali menimbulkan permasalahan karena tidak selalu disertai dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Alokasi dana yang lebih besar dapat memungkinkan akses terhadap sumber daya yang lebih baik, tetapi ini tidak menjamin bahwa hasil yang diperoleh akan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, peningkatan anggaran tanpa evaluasi dan penyesuaian kebutuhan dapat menyebabkan pemborosan dan penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. Hal ini juga dapat menyebabkan inflasi anggaran, yang merupakan peningkatan biaya operasional dari pada yang seharusnya.

Permasalahan realisasi anggaran dapat terjadi karena kurangnya pemahaman sumber daya manusia dalam mengelola keuangan APBD dan kurangnya internal control yang berkaitan dengan belanja yang bisa menyebabkan *overspending*, *misspending*, *underspending*, maupun *fraud spending* (Hesda, 2017).

Penelitian ini melihat seberapa besar kinerja keuangan dengan perhitungan rasio keuangan belanja daerah dengan menggunakan alat analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, efisiensi belanja, efektivitas belanja. Eksekutif masih menghadapi kesulitan dalam penyusunan anggaran. Anggaran adalah pelaksanaan anggaran problem yang dihadapi adalah penyimpangan dari jadwal/rencana kegiatan serta penyerapan yang rendah, cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran (Hidayat, 2022).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemali Comal**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Kinerja Keuangan pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemali Comal periode 2021-2023?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemali Comal periode 2021-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti berharap bisa bermanfaat sebagai alat yang tepat untuk menerapkan teori akuntansi dan memperluas wawasan yang dipelajari selama perkuliahan.

2. Bagi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air PSDA Pemali Comal

Peneliti berharap memberikan informasi tambahan dan masukan dalam pengambilan kebijakan bagi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air PSDA Pemali Comal.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi atau penjelasan tentang pengetahuan di bidang akuntansi yang diharapkan dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan mengenai Kinerja Keuangan dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja.

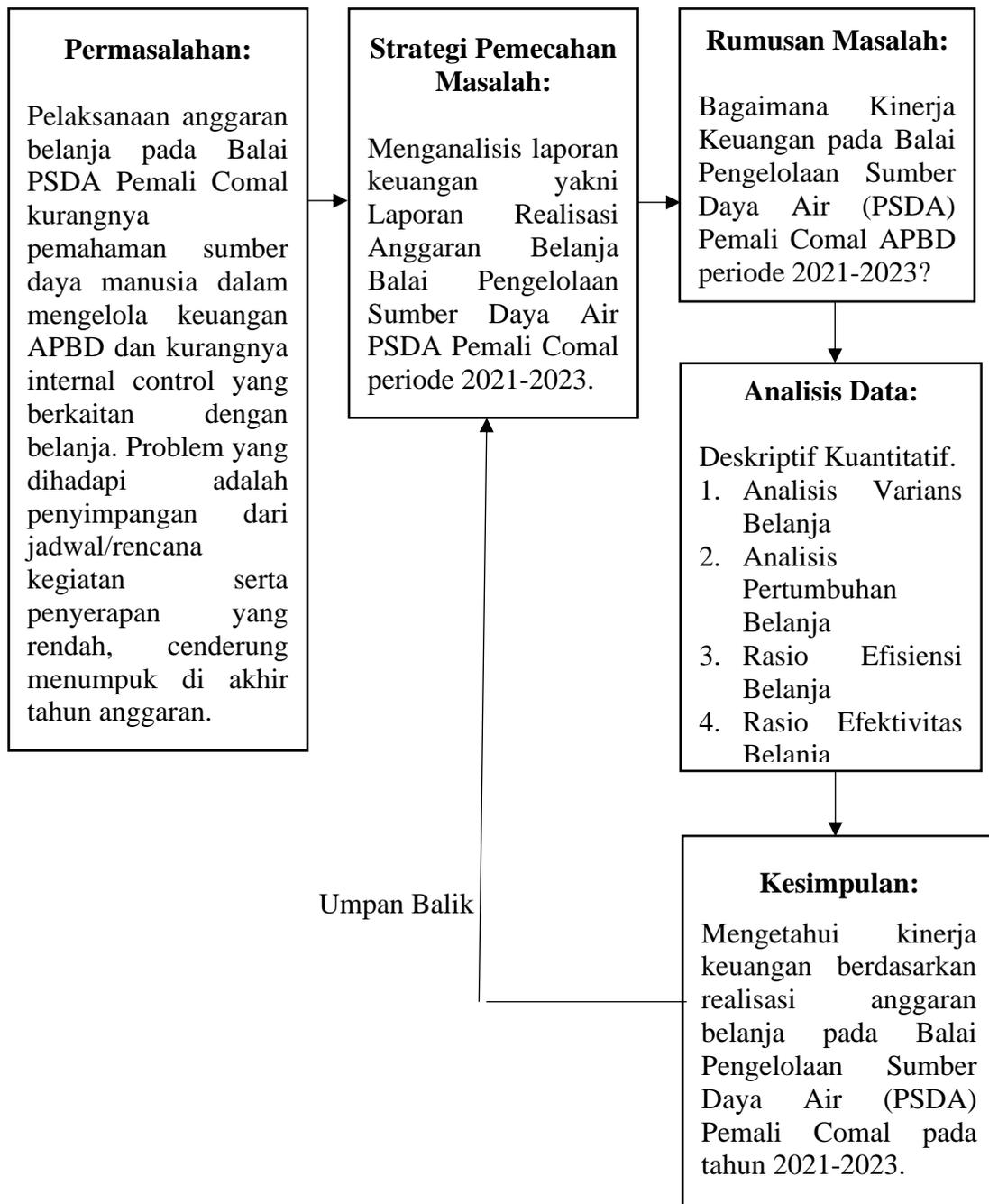
1.5. Batasan Masalah

Untuk mengantisipasi adanya perluasan pembahasan dalam penelitian ini, penulis hanya membahas terkait dengan menganalisis rasio kinerja keuangan varians belanja, efektivitas belanja, efisensi belanja, pertumbuhan belanja dari periode 2021-2023 pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).

1.6. Kerangka Berpikir

Pengukuran kinerja dalam instansi pemerintah adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan tujuan mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah, menilai pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar atau tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kerangka pemikiran merupakan sebuah alur yang menggambarkan proses penelitian secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kualitas, khususnya efektivitas dan efisiensi, dari perencanaan program yang telah dicapai. Pendekatan yang digunakan adalah melalui penggunaan rasio keuangan, seperti rasio varians belanja, rasio pertumbuhan belanja, rasio efisiensi belanja dan rasio efektivitas belanja. Sementara itu, rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir peneliti sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari 3 bagian, dimana masing-masing bagian dan bab akan disusun secara sistematis sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal bertujuan untuk memberikan akses kemudahan bagi para pembaca untuk menemukan bagian-bagian penting yang ada di dalam tugas akhir ini. Pada bagian awal berisi sampul depan dan halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tugas akhir, halaman lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademisi, halaman persembahan, halaman motto, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar simbol, serta daftar lampiran.

2. Bagian Isi yang terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I akan meliputi beberapa subbab yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan kajian pustaka, penelitian terdahulu, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan dengan jelas mengenai lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta definisi operasional variabel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV peneliti akan memberikan hasil analisa, menjelaskan serta menyajikan data dari hasil penelitiannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini sebagai penutup dalam tugas akhir dari penelitian yang diambil berdasarkan hasil dari pembahasan dan keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang ditujukan untuk memberikan dampak yang baik bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi mengenai kepustakaan atau literature yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan dalam penelitian ini